

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annisah, S., 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Badudu, Y., 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darmadji, T., dan Hendy M Fakhrudin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fuady, M., 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, S., 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisoeperto, H., 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, A., 1996, *Pengantar Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M.Y., 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hoff, J., 2000, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Penerjemah Kartini Muljadi)*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Irwan, B., 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*, PT Alumni, Bandung.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, R. A., 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

- Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, P.M., 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muljadi, K., dan Gunawan Widjaja., 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nasarudin, M.I., dan Indra Surya, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rumapea, T., 2010, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sastrawidjaja, M. S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, Alumni, Bandung.
- Sembiring, S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kepailitan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shubhan, M.H., 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Shook, R.J., 2002, *Kamus Lengkap Wall Street*, Erlangga, Jakarta.
- Sinaga, S. M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Situmorang., V. M., dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, S.R., 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

_____, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Perdanamedia Group, Jakarta.

Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudrayat, 2008, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka, Bandung.

Sumardjono, M.S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Surakhmad, W., 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Sutedi, A., 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyo, B., 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung

Widjaja, G., 2005, *Efek Sebagai Benda*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wijayanta, T., 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yani, A., 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yani, A., dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

B. Artikel, Jurnal dan Tesis

Defiana, E., dan Tata Wijayanta., Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Oktober 2010, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 482-497.

Febrizarli, A., dkk, 2014, Aspek Hukum Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan Skema *Mini Master Repurchase Agreement* (Mini MRA), Universitas Indonesia, Depok, melalui www.lib.ui.ac.id

Fraksi Kebangkitan Bangsa, “Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap RUU KPKPU”, dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2004, Jakarta.

Isfardiyana, S. H., Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 3, Nomor 3 Tahun 2016, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 628-650.

Indradi, Repurchase Agreement (Repo): Dualisme dalam Prespektif Pajak Penghasilan, *Inside Tax*, Edisi 24, Oktober 2014, hlm. 52-59.

Karna, I. M., dkk, 2005, *Seri Film Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia*, Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Korupsi, Jakarta.

Muljadi, K., Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, *Pusat Pengkajian Hukum*, 26-28 Januari 2004, Jakarta.

Sitanggang, A., 2016, PKPU Pada Perusahaan Publik Dan Dampaknya Bagi Investor, *Buletin HKHPM*, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Jakarta, Edisi No. 26, hlm. 15-17.

Wijayanta, T., Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Mimbar Hukum*, volume 26, Nomor 1, Februari, 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1-13.

C. Internet

Daniri., A., “Sekilas tentang Repo, Bilout dan Buyback Saham”, *Artikel*, melalui <http://www.madani-ri.com/2008/11/04/sekilas-tentang-repo-bailout-dan-buy-back-saham/>.

Data Direktorat Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan, diakses melalui <http://webojk.ojk.go.id>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

F. Wawancara

Nani Indrawati, 2017, Analisis terhadap Pembatalan Putusan Pailit PT AAA Sekuritas, *Wawancara*, Semarang, 17 Juli.

_____, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Efek, *Wawancara*, Semarang, 17 Juli.

Efendy H. Purba, 2017, Kepailitan Perusahaan Efek, *Wawancara*, Jakarta, 29 Juli.

_____, Upaya Kreditor Perusahaan Efek untuk Memperoleh Pelunasan
Utang dari Perusahaan Efek, *Wawancara*, Jakarta, 29 Juli.

_____, Pengaturan tentang Syarat Kepailitan, , *Wawancara*, Jakarta,
29 Juli.